

**PENGARUH *SALES GROWTH*, KEPEMILIKAN MANAJERIAL, KEPEMILIKAN  
INSTITUSIONAL, DAN KOMISARIS INDEPENDEN  
TERHADAP *TAX AVOIDANCE***

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian  
Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Akuntansi



Oleh:

**Ananda Ayu Rahmawati**  
2018310654

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS  
SURABAYA  
2022**

## PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

N a m a : Ananda Ayu Rahmawati  
Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 13 Maret 2000  
N.I.M : 2018310654  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Akuntansi  
Program Pendidikan : Sarjana  
Konsentrasi : Audit dan Perpajakan  
Judul : Pengaruh *Sales Growth*, Kepemilikan Manajerial,  
Kepemilikan Institusional, dan Komisaris Independen  
Terhadap *Tax Avoidance*.

**Disetujui dan diterima baik oleh:**

Dosen Pembimbing,  
Tanggal: .....

Co. Dosen Pembimbing  
Tanggal: .....

**(Dr. Nanang Shonhadji, S.E., Ak., M.Si., CA., CIBA., CMA.)**

**(Nurul Mustafida, S.E. M.Sc.)**

NIDN: 0731087601

NIDN: 0722079401

Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi

Tanggal: .....

**(Dr. Nurul Hasanah Uswati Dewi, S.E., M.Si., CTA.)**

NIDN: 0716067802

# PENGARUH SALES GROWTH, KEPEMILIKAN MANAJERIAL, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DAN KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP TAX AVOIDANCE

Ananda Ayu Rahmawati  
Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya  
2018310654@students.perbanas.ac.id

## ABSTRACT

*This study aims to determine the effect of sales growth, managerial ownership, institutional ownership, and independent commissioners on tax avoidance. In this study, to see the tax avoidance carried out by the company using the cash effective tax rate (CETR) formula. This study focuses on manufacturing companies listed on the Indonesian stock exchange in 2016-2020. The method used is a quantitative method. The researcher uses 190 manufacturing companies in Indonesia as the population. While the sample used is 40 manufacturing companies that have been listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2016–2020 period. The sampling technique used in this study was purposive sampling, which is a method of collecting samples with the criteria set by the researcher. The analytical technique used in this research is descriptive statistical analysis and multiple linear regression analysis with the help of the IBM SPSS Statistics 24 application for Windows. The data used is secondary data originating from the financial statements of manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange during 2016-2020. The results of this study indicate that managerial ownership and independent commissioners have an effect on tax avoidance, while sales growth and institutional ownership have no effect on tax avoidance.*

### Key words:

*Tax avoidance, Sales Growth, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen .*

## PENDAHULUAN

Peran pajak dalam pemerintahan di Indonesia penting untuk membangun perencanaan anggaran dan strategi pengelolaan dalam bernegara. Pajak sendiri merupakan salah satu pembiayaan paling penting di APBN pemerintahan Indonesia dibandingkan dengan penerimaan lainnya (Ashari *et al.*, 2020). Pemerintah akhirnya memutuskan untuk membuat suatu regulasi yang nantinya akan mengatur mengenai perpajakan di Indonesia agar dapat memaksimalkan penerimaan pajaknya. Sesuai dengan Undang - Undang No 16 tahun 2009 mengenai tata cara dan ketentuan umum perpajakan pasal 1 ayat 1, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang berlaku meski timbal

balik yang didapatkan tidak secara langsung. Berikut merupakan data dari target pendapatan pajak di Indonesia dan realisasi penerimaan pajaknya dari tahun 2016–2020:

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Penerimaan Pajak Di Indonesia**

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Penerimaan Pajak Sektor Manufaktur
2016	1.355,20	1.105,81	81,96%	
2017	1.283,6	1.151,03	89,4%	32%
2018	1.424,00	1.315,93	92,41%	30%
2019	1.577,56	1.332,06	84,44%	29,7%
2020	1.198,82	1.069,98	89,25%	

Sumber: diolah dari laporan kinerja kementerian 2018 dan 2020 dan laporan APBN KITA edisi januari 2017, 2018, dan 2019 (*dalam triliun Rupiah*).

Tabel 1.1 menunjukkan pencapaian target penerimaan pajak dari tahun 2016-2020

yang masuk sebagai pendapatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dilihat dari realisasi penerimaan pajak di Indonesia, pada tahun 2016–2019 mengalami kenaikan secara berturut-turut sebesar 1.105,81 triliun, 1.151,3 triliun, 1.315,93 triliun, dan 1.332,06 triliun dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak di tahun 2020 yang merosot jauh sebesar 1.069,98 triliun. Di tahun 2018 capaian penerimaan pajak di Indonesia sempat mengalami peningkatan sebesar 3,01% dibandingkan dengan capaian tahun 2017 dan menjadi capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir. Jika dilihat dari tabel 1.1 secara keseluruhan, realisasi penerimaan pajak di tahun 2017, 2018, 2019 yang 32%, 30%, dan 29,7% nya di sumbang dari perusahaan manufaktur, namun masih cenderung mengalami penurunan jika dibandingkan dengan target penerimaan pajaknya. Hal ini mengungkapkan jumlah penerimaan pajak yang seharusnya didapatkan oleh negara tidak sesuai dengan yang seharusnya dibayarkan oleh wajib pajak.

Upaya pemerintah untuk pengoptimalan penerimaan sektor pajak ini tidak dapat dihindarkan dari kendala-kendala yang ada. Salah satunya adalah praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Pemerintah berusaha agar dapat mengoptimalkan penerimaan pajak negara, namun hal ini berlawanan dengan tujuan dari perusahaan sebagai wajib pajak yang ingin meminimalkan pengeluarannya untuk membayar pajak. Menurut asumsi dari perusahaan, pajak dapat menjadi beban yang akan mengurangi laba perusahaan serta berpengaruh pada kelangsungan hidup dari perusahaan (Mukhtar, 2021). Sebagai wajib pajak, imbalan yang didapatkan oleh perusahaan tidak secara langsung didapat dari hasil mereka membayar pajaknya, meskipun dana dari pajak ini nantinya digunakan untuk kepentingan negara dan untuk memakmurkan kesejahteraan rakyat, perusahaan tetap memilih untuk melakukan *tax avoidance* agar dapat meminimalkan pengeluaran pajaknya. Menurut Suandy (2017:8) *tax avoidance* merupakan upaya

untuk meminimalkan pajak dengan tetap melihat dan mengikuti peraturan yang ada. Sifat *tax avoidance* yang tidak melanggar peraturan perpajakan ini membuat pemerintah tidak dapat memberikan sanksi hukum kepada perusahaan, meskipun *tax avoidance* ini akan mengurangi penerimaan negara.

Berdasarkan fenomena dan gap penelitian, maka penelitian ini penting untuk dilakukan sehingga peneliti ingin menguji pengaruh *sales growth*, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan komisaris independen terhadap *tax avoidance*. Saat ini peneliti ingin melakukan pengujian di seluruh sektor perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2020.

## KERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS

### Agency Theory

Memahami teori yang dikemukakan oleh Berle dan Means (1931) yaitu teori keagenan yang selanjutnya dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan terdapat hubungan kerja antara pihak pemberi wewenang (*principal*) dan pihak penerima wewenang (*agent*) dengan bentuk kontrak kerja yang telah disepakati sebelumnya atau bisa disebut dengan *nexus of contract*. Dikaitkan dengan *tax avoidance*, *principal* dalam penelitian ini adalah pemerintah sedangkan agen adalah perusahaan. Pemerintah sebagai *principal* akan menjadi pengawas terhadap penerimaan pajak yang menjadi kewajiban perusahaan sebagai wajib pajak badan agar perusahaan ini membayar pajaknya sesuai dengan pengenaan pajaknya. Sedangkan perusahaan sebagai agen ingin terus meningkatkan hasil keuangannya serta perluasan investasinya tanpa membuat pengenaan pajaknya semakin tinggi. Perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan ini memunculkan peluang konflik kepentingan yang dikenal sebagai *agency theory*.

Selain itu, perbedaan kepentingan antara *principal* dengan agen ini juga dapat

menimbulkan masalah yang disebut dengan asimetri informasi yang memicu masalah keagenan, dimana pemerintah sebagai *principal* yang bertugas memungut pajak memerintahkan perusahaan untuk membayar kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang – undangan pajak yang ada. Sedangkan perusahaan (agen) yang merupakan wajib pajak badan berupaya agar dapat memenuhi kepentingan pribadi sendiri dengan melakukan *tax avoidance* agar pajak yang dibayarkan kepada negara dapat diminimalkan seminimal mungkin.

### **Tax Avoidance**

*Tax avoidance* merupakan sebuah rekayasa atau bisa disebut dengan *tax affairs* namun masih tetap berada dalam ketentuan pajak (*lawful*) (Suandy, 2017:8). Untuk meminimalisir besarnya pajak yang harus dikeluarkan oleh perusahaan, banyak cara yang dapat dilakukan, dari yang berada dalam lingkup peraturan perpajakan atau bisa dikatakan dengan cara legal sampai dengan cara ilegal yaitu dengan melanggar peraturan perpajakan. Dalam praktiknya *tax avoidance* sendiri menggunakan cara untuk meminimalkan pembayaran pajak dengan cara yang legal atau mengurangi jumlah pajak terutang perusahaan dengan memanfaatkan kelemahan dari peraturan perpajakan atau celah yang ada. Umumnya praktik *tax avoidance* ini dilakukan oleh perusahaan besar seperti perusahaan di sektor manufaktur karena transaksi yang terjadi kompleks dan variatif, hal ini membuat perusahaan besar dapat membayar pajak lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan kecil. Kondisi ini membuat perusahaan kecil enggan untuk melunasi kewajiban perpajakannya dan berefek pada penerimaan pajak di Indonesia (Krisna, 2019). Dijelaskan oleh komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* bahwasanya *tax avoidance* memiliki tiga karakter yaitu, pertama, *tax avoidance* memiliki unsur artifisial atau buatan karena berbagai pengaturan terlihat seolah-olah ada didalamnya yang sebenarnya adalah tidak, hal ini dilakukan

karena tidak adanya faktor pajak. Kedua, selalu memanfaatkan *loopholes* dari undang–undang maupun ketentuan pajak, padahal pada penerapannya bukan itu maksud dari pembuat undang – undang. Yang terakhir, kerahasiaan penting untuk diperhatikan. Para konsultan pajak akan menunjukkan cara untuk melakukan *tax avoidance* dengan syarat perusahaan sebagai wajib pajak badan dapat menjaga rahasia dengan baik (*Council of Executive Secretaries of Tax Organizations*, 1991).

### **Sales Growth**

Menurut Kasmir (2016:107) *sales growth* ini memiliki definisi yang menunjukkan sejauh mana perusahaan dapat meningkatkan penjualannya dibandingkan dengan total dari keseluruhan penjualannya. Sedangkan menurut James & John (2014:122) *sales growth* menjelaskan tingkat kestabilan jumlah penjualan perusahaan pada setiap periode tahun buku dan pertumbuhan penjualan merupakan peningkatan dari segi jumlah produktivitas dari perusahaan dalam menjual produknya dari tahun sebelumnya. Dari kedua definisi *sales growth* yang dipaparkan oleh Kasmir (2016:107) dan James & John (2014:122) dapat disimpulkan bahwa *sales growth* merupakan rasio yang digunakan untuk melihat peningkatan dari penjualan perusahaan setiap periode dari tahun sebelumnya.

Dalam penelitian ini, *sales growth* menjadi faktor yang berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena dengan *sales growth*, perusahaan dapat memprediksi seberapa besar laba yang dihasilkan. Seperti yang dijelaskan oleh Sinaga *et al.*, (2019) bahwa *sales growth* mencerminkan keberhasilan operasional dari perusahaan di periode sebelumnya yang dapat dijadikan sebagai prediksi pertumbuhan di masa mendatang. Sehingga ketika perusahaan memiliki *sales growth* yang tinggi, maka hal itu menandakan perusahaan tersebut akan memiliki laba yang tinggi juga yang akan berpengaruh pada besarnya jumlah pajak yang harus dibayar, oleh karena itu, perusahaan

akan cenderung untuk melakukan *tax avoidance* (Dewinta & Setiawan, 2016).

### **Kepemilikan Manajerial**

Kepemilikan manajerial merupakan pemegang saham dari pihak manajemen perusahaan itu sendiri yang secara aktif ikut andil dalam pengambilan keputusan di perusahaan (Sonya Majid, 2016:4). Keberadaan kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan akan berpengaruh terhadap *tax avoidance*, karena seperti yang dikatakan oleh Septiadi *et al.*, (2017) bahwasannya jika seorang manajer menjadi pemegang saham dalam perusahaan tersebut, maka manajer akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusannya.

Pihak manajemen perusahaan bertanggung jawab dalam menentukan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh perusahaan dan berperan dalam menghasilkan laba perusahaan, sehingga jika kepemilikan manajerial di dalam perusahaan tinggi maka pengaruh pihak manajemen melakukan *tax avoidance* juga tinggi (Ashari *et al.*, 2020). Menurut Yadasang (2019) apabila manajemen di dalam perusahaan memiliki saham yang besar maka akan membantu mengurangi perilaku oportunistik dari manajemen itu sendiri, sehingga manajemen akan selalu berhati-hati dalam mengambil keputusan yang juga akan berpengaruh pada dirinya sendiri sebagai pemegang saham.

### **Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan institusional merupakan besarnya persentase saham yang dimiliki oleh institusi dan merupakan alat untuk menekan konflik kepentingan (Pasaribu, Topowijaya & Sri, 2016:156). Tingginya kepemilikan institusional dalam perusahaan akan menambah tingkat pengawasan terhadap manajer dalam perusahaan serta dapat mengurangi konflik kepentingan dalam teori *agency* yang dipaparkan oleh Jensen & Meckling (1976) antara *stakeholder (principal)* dan manajer (agen) yang berpengaruh pada praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini karena *tax avoidance* dapat mencerminkan

kepentingan pribadi dari manajer yang melakukan manipulasi laba yang berakibat dengan adanya informasi yang tidak benar untuk investor, dengan begitu, investor dapat memberikan penilaian yang buruk bagi perusahaan (Karimah & Taufiq, 2016).

Dengan adanya kepemilikan institusional akan dapat membantu perusahaan untuk memonitoring manajer dalam mengambil keputusan untuk melakukan *tax avoidance* (Dewi, 2019). Dalam menentukan keputusan yang strategis, kepemilikan institusional juga memiliki keterlibatan langsung untuk mengambil keputusan dalam melakukan *tax avoidance*.

### **Komisaris Independen**

Menurut Effendi (2016:41) komisaris independen bukan anggota dari pemegang saham mayoritas, pejabat anggota manajemen, maupun anggota lain yang memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas di dalam perusahaan yang mengawasi pengelolaan perusahaan tersebut. Komisaris independen sendiri diusulkan oleh pemegang saham (selain pemegang saham pengendali) dalam rapat umum pemegang saham (RUPS). Menurut peraturan OJK nomor 33/POJK.04/2014 tentang direksi dan dewan komisaris emiten menjelaskan ketentuan jumlah komisaris independen dalam perusahaan adalah sekurang-kurangnya 30% dari seluruh anggota dewan komisaris (Diantari & Ulupui, 2016).

Dengan adanya komisaris independen di dalam perusahaan akan membantu perusahaan untuk memberikan arahan dalam mengelola perusahaan termasuk dalam menentukan kebijakan tarif pajak efektif yang harus dibayarkan perusahaan (Diantari dan Ulupui, 2016). Komisaris independen juga bertanggung jawab kepada para pemegang saham dalam mengawasi ketaatan perusahaan dalam membayar pajak (Diantari & Ulupui, 2016).

### **Pengaruh Sales Growth Terhadap Tax Avoidance**

*Sales growth* menunjukkan bagaimana perusahaan dapat meningkatkan penjualannya dibandingkan dengan total keseluruhan dari penjualannya (Kasmir, 2016:107). Menurut Faradisty *et al.*, (2019) *tax avoidance* akan cenderung dilakukan oleh perusahaan dengan *sales growth* yang tinggi karena penghasilan yang didapatkan akan tinggi juga dan menyebabkan beban pajak yang harus dikeluarkan perusahaan besar. Hal ini yang membuat perusahaan memilih untuk melakukan *tax avoidance* agar laba perusahaan yang dihasilkan tidak terpotong banyak untuk membayar pajak terutang yang akan menguntungkan perusahaan. Namun, dengan dilakukannya *tax avoidance* oleh perusahaan karena *sales growth* yang tinggi ini, menyebabkan perbedaan kepentingan dari *principal*, pemerintah, yang ingin agar perusahaan dapat membayar pajaknya sesuai dengan pengenaan pajaknya sedangkan perusahaan sebagai agen ingin agar pengenaan pajaknya rendah. Dengan begitu akhirnya menimbulkan perbedaan kepentingan antara perusahaan dan pemerintah seperti yang dijelaskan dalam *agency theory*.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan Dewinta & Setiawan (2016) menunjukkan *sales growth* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* dimana semakin tinggi *sales growth* di perusahaan maka kecenderungan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* juga tinggi. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Faradisty *et al.*, (2019) yang menunjukkan *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

**H1: *Sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.**

### **Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap *Tax Avoidance***

Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh pihak manajemen perusahaan yang aktif ikut andil dalam pengambilan keputusan di perusahaan (Sonya Majid, 2016:4). Adanya kepemilikan saham oleh manajer ini

diharapkan dapat membantu untuk mengurangi konflik kepentingan antara *stakeholder (principal)* dan manajer (agen) yang dijelaskan di teori *agency*, dan membantu dalam menyelaraskan kepentingan antara pemegang saham (*stakeholder*) dan manajer.

Kepemilikan manajerial di perusahaan memiliki pengaruh positif, dimana semakin tinggi kepemilikan manajerial di dalam perusahaan maka semakin tinggi praktik *tax avoidance* yang dilakukan di perusahaan (Wijayanti *et al.*, 2018). Menurut Ashari *et al.*, (2020) pihak manajemen perusahaan bertanggung jawab dalam menentukan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh perusahaan dan berperan dalam menghasilkan laba perusahaan, sehingga jika kepemilikan manajerial di dalam perusahaan tinggi maka pengaruh pihak manajemen melakukan *tax avoidance* juga tinggi (Ashari *et al.*, 2020).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ashari *et al.*, (2020) menunjukkan jika kepemilikan manajerial berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan dimana semakin tinggi tingkat kepemilikan manajerial dalam perusahaan maka semakin tinggi juga pengaruh pihak manajemen dalam melakukan *tax avoidance* di perusahaan. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Putri & Lawita (2019), Wijayanti *et al.*, (2018) dan Ashari *et al.*, (2020) bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

**H2: Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *tax avoidance*.**

### **Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance***

Kepemilikan institusional merupakan proporsi banyaknya saham yang dimiliki oleh institusi yang terdiri dari perusahaan asing, pemerintah, bank atau lembaga keuangan seperti asuransi, dan dana pensiun pada perusahaan (Wayan *et al.*, 2016:177). Kepemilikan institusional ini

memiliki peran penting dalam mengurangi konflik keagenan yang terjadi antara pemegang saham (*stakeholder*) dan manajer (Jensen dan Meckling, 1976). Perusahaan dengan kepemilikan saham yang didominasi oleh institusi perusahaan lain akan meningkatkan pengawasan dalam mengawasi kinerja dari manajemen. Semakin tinggi kepemilikan institusional di dalam perusahaan maka akan semakin kuat kendali yang dilakukan oleh pihak eksternal dalam menekan manajemen di dalam perusahaan untuk melakukan kecurangan termasuk dilakukannya *tax avoidance* yang legal sekalipun (Wijayanti *et al.*, 2018). Hal ini akan mencerminkan *good corporate governance* yang baik dimana kepemilikan institusional yang menjadi salah satu faktor dari GCG ini melaksanakan tanggung jawab yang sebenarnya yaitu dengan melakukan pengawasan untuk mencapai tata kelola perusahaan yang baik.

Pengawasan yang dilakukan oleh kepemilikan institusional ini tentu saja tidak luput dari pengawasan praktik *tax avoidance* yang dilakukan didalam perusahaan. Penelitian yang dilakukan Astuti *et al.*, (2020) dan Dariuni *et al.*, (2019) menunjukkan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* karena semakin tinggi kepemilikan institusional dalam perusahaan akan menekan kesempatan manajemen untuk melakukan *tax avoidance*. Hasil ini sejalan dengan penelitian Krisna (2019) yang menunjukkan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* dimana semakin tinggi kepemilikan institusional akan menekan praktik penghindaran pajak di perusahaan.

**H3: Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*.**

### **Pengaruh Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance***

Komisaris independen menurut Agoes & Ardana (2014:110) merupakan pihak yang ditunjuk sebagai pihak independen berdasarkan pengalaman,

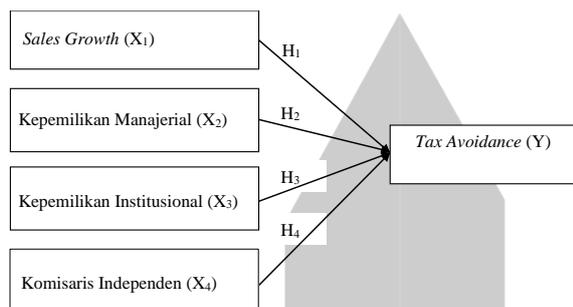
pengetahuan, serta keahlian profesional yang dimilikinya dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk kepentingan perusahaan. Dihubungkan dengan *agency theory*, anggota dari dewan komisaris yang berasal dari eksternal perusahaan atau yang dikenal dengan dewan komisaris independen ini berperan sebagai pengawas dari jalannya manajemen perusahaan. Komisaris independen memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* karena di dalam perusahaan, komisaris independen memiliki peran sebagai pihak netral antara *stakeholder* dan manajer. Sebagai penengah antara *stakeholder* dan manajer, komisaris independen mengontrol tindakan yang dilakukan oleh pemegang saham dan manajer. Sehingga dengan adanya dewan komisaris independen akan dapat membantu untuk meminimalkan dilakukannya *tax avoidance* di dalam perusahaan.

Semakin banyak komisaris independen di dalam perusahaan akan menghambat perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*, sehingga CETR menjadi tinggi, karena dengan menjalankan fungsi pengawasan komisaris independen dapat mempengaruhi manajemen untuk membuat laporan keuangan yang baik (Faradisty *et al.*, 2019). Hal ini menunjukkan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Alviyani (2016) menunjukkan hasil komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* dan ini sejalan dengan penelitian Faradisty *et al.*, (2019), Wijayanti *et al.*, (2018) dan Diantari & Ulupui (2016) yang menunjukkan hasil komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

**H4: Komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*.**

### **KERANGKA PEMIKIRAN**

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah:



Sumber: diolah, 2021

## METODE PENELITIAN

### Rancangan Penelitian

Berdasarkan paradigma riset, riset ini merupakan penelitian kuantitatif, dimana penelitian kuantitatif adalah metode ilmiah lantaran sudah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah seperti empiris/konkrit, terukur, rasional, obyektif, serta sistematis (Sugiyono, 2017:7). Menurut (Sekaran & Bougie, 2017:76) penelitian kuantitatif merupakan metode ilmiah dengan data yang berbentuk angka atau bilangan yang dapat diolah dan dianalisis menggunakan perhitungan statistika. Penelitian ini masuk penelitian kuantitatif dengan pengujian hipotesis dimana merupakan suatu tahapan dalam proses penelitian untuk menentukan jawaban apakah hipotesis diterima atau ditolak.

Penelitian ini masuk ke dalam dimensi waktu riset *pooled* data atau panel data, dimana data diambil pada multi perusahaan dan multi periode yaitu pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016–2020. Berdasarkan jenis dari penelitian ini maka penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan objek atau hasil dari penelitian.

### Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

#### 1. Variabel *Tax Avoidance*

*Tax avoidance* merupakan besarnya beban pajak yang dapat diminimalkan oleh perusahaan. Model pengukuran *tax avoidance* pada penelitian ini menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) yang diharapkan mampu untuk mengidentifikasi keagresifan dari *tax avoidance* (Astuti *et al.*, 2020). Peneliti memilih menggunakan

pengukuran ini karena CETR menggambarkan semua aktivitas *tax avoidance* yang mengurangi pembayaran pajak perusahaan kepada otoritas pajak serta pengukuran ini mudah untuk dilakukan. Nilai CETR berkisar lebih dari 0 dan kurang dari 1, dimana semakin besar nilai CETR maka semakin rendah *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan (Astuti & Aryani, 2017).

$$CETR = \frac{\text{Beban Pajak Kini}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

#### 2. Variabel *Sales Growth*

*Sales Growth* didefinisikan sebagai salah satu indikator yang menggambarkan kemampuan perusahaan dari waktu ke waktu, dimana jika perusahaan memiliki *sales growth* yang tinggi, maka perusahaan tersebut dapat dikatakan sukses dalam menjalankan strateginya. Di dalam *Sales growth* digambarkan bagaimana kemampuan perusahaan dalam bertahan di posisi ekonominya, di antara pertumbuhan perekonomian dan sektor usahanya (Ashry & Fitra, 2019).

$$\text{Sales Growth} = \frac{\text{Penjualan}(t) - \text{Penjualan}(t-1)}{\text{Penjualan}(t-1)}$$

#### 3. Variabel Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial didefinisikan sebagai kondisi dimana didalam perusahaan, manajer memiliki saham perusahaan yang artinya sebagai pemegang saham perusahaan. Variabel ini telah dijadikan variabel oleh peneliti sebelumnya yaitu (R. D. Putri, 2018), dengan rumus:

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki manajemen}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$$

#### 4. Variabel Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan institusi atau lembaga perusahaan seperti bank, asuransi, dan kepemilikan institusi lain yang memiliki saham di dalam perusahaan. Dalam penelitian ini kepemilikan institusional diukur mengikuti penelitian dari (Lamora *et al.*, 2016) dengan rumus:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki Institusional}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$$

## 5. Variabel Komisaris Independen

Komisaris independen merupakan seseorang yang tidak terafiliasi dalam hal apapun dengan pemegang saham pengendali, tidak menjalin hubungan kepengurusan, keuangan ataupun keluarga dengan komisaris atau direksi serta tidak memiliki jabatan sebagai direktur dari perusahaan yang berhubungan dengan perusahaan pemilik menurut peraturan yang telah dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia. Perhitungan komisaris independen ini mengacu pada penelitian (Diantari & Ulupui, 2016) dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Anggota Dewan Komisaris}} \times 100\%$$

### Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 190 perusahaan manufaktur di Indonesia sebagai populasinya. Sedangkan sampel yang dipilih adalah 40 perusahaan manufaktur yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016–2020. Teknik pengambilan sampel penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yang merupakan metode pengumpulan sampel dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti. Terdapat kriteria yang ditetapkan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Merupakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Perusahaan mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit secara berturut-turut dari tahun 2016–2020 di Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)).
3. Menggunakan mata uang rupiah dalam penyajian laporan keuangan tahunannya agar tidak menimbulkan perbedaan akibat dari kurs yang berubah-ubah.
4. Perusahaan yang memiliki beban pajak kini selama periode 2016-2020.
5. Perusahaan yang memiliki kelengkapan *sales growth*, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan komisaris independen selama periode 2016-

2020

### Data dan Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder. Data didapat dari laporan keuangan perusahaan manufaktur yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016–2020. Data tersebut ditampilkan di website resmi IDX (*Indonesia Stock Exchange*). Dalam penelitian ini metode pengumpulan datanya adalah strategi arsip yang merupakan kumpulan data dari basis data atau catatan yang sudah ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Data

Pada sub bab ini akan menjelaskan hasil analisis data dari pengolahan data yang telah dikumpulkan pada sub-bab sebelumnya. Pengolahan data dilakukan menggunakan aplikasi IBM SPSS *Statistik 24 for Windows* untuk membantu pengujian data. Pada penelitian ini dilakukan beberapa pengujian, yaitu analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, dan uji hipotesis yang telah dipaparkan.

### Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui nilai minimum, maksimum, standar deviasi dan rata-rata yang dapat memberikan gambaran data menjadi informasi yang jelas sehingga mudah untuk dipahami pada variabel penelitian yaitu *tax avoidance*, *sales growth*, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan komisaris independen di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020. Berikut merupakan penjelasan hasil dari analisis statistik deskriptif:

#### 1. Tax Avoidance

*Tax avoidance* adalah penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi maupun badan dengan cara mencari celah dari peraturan perpajakan agar dapat dimanfaatkan untuk meminimalkan pajak yang dikeluarkan wajib pajak.

Banyaknya sampel yang digunakan penelitian ini adalah sebanyak 140 data

dengan nilai minimum sebesar 0,005 yang dimiliki oleh perusahaan Roda Vivatex Tbk (RDTX) pada tahun 2020, hal tersebut menjelaskan bahwa Roda Vivatex Tbk (RDTX) dengan nilai CETR nya sebesar 0,005 lebih mendekati nilai 0 terindikasi melakukan *tax avoidance* cukup tinggi dibandingkan perusahaan lainnya yang menyebabkan semakin kecilnya penerimaan pendapatan negara disektor pajak. Nilai maksimum dari *tax avoidance* sebesar 0,394 berasal dari perusahaan Sekar Bumi Tbk (SKBM) pada tahun 2017, dimana nilai CETR 0,394 ini lebih mendekati nilai 1, sehingga menunjukkan bahwa *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan Sekar Bumi Tbk (SKBM) cukup rendah dibandingkan perusahaan manufaktur yang lain. Selanjutnya, berdasarkan nilai *mean* pada *tax avoidance* menunjukkan nilai sebesar 0,22867 yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai standar deviasi yaitu 0,070164..

Nilai *tax avoidance* yang mengalami naik turun di setiap tahunnya ini dapat disebabkan oleh tingkat laba sebelum pajak dari perusahaan manufaktur yang mengalami perubahan setiap tahunnya. Perusahaan yang laba sebelum pajaknya tinggi namun nilai CETR nya rendah terindikasi melakukan *tax avoidance* agar dapat meminimalkan beban pajak yang perlu mereka bayar. Sebaliknya, jika nilai CETR perusahaan tinggi maka tingkat *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan rendah karena tingkat kesadaran perusahaan dalam membayar pajak sesuai dengan yang seharusnya tinggi, sehingga, membantu pemerintah dalam memaksimalkan penerimaan negara disektor pajak.

## **2. Sales Growth**

*Sales growth* menjelaskan tingkat kestabilan dari jumlah penjualan perusahaan pada setiap tahun dan peningkatan dari jumlah produktivitas perusahaan dalam menjual produknya dari tahun sebelumnya (James & John, 2014:122).

Banyaknya sampel yang digunakan penelitian ini adalah sebanyak 140 data

dengan nilai minimum sebesar – 26,2% yang dimiliki oleh perusahaan Astra International Tbk. (ASII) pada tahun 2020. Hal tersebut menjelaskan bahwa perusahaan Astra International Tbk. (ASII) memiliki tingkat penjualan (*sales growth*) yang rendah dan menghasilkan pendapatan yang rendah pula. Nilai maksimum dari *sales growth* sebesar 41,8% berasal dari perusahaan United Tractors Tbk. (UNTR) pada tahun 2017, yang menunjukkan bahwa perusahaan United Tractors Tbk. (UNTR) memiliki tingkat penjualan yang tinggi dibandingkan dengan perusahaan manufaktur yang lain. Selanjutnya, berdasarkan nilai *mean* dari variabel *sales growth* menunjukkan nilai sebesar 6,511% yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai standar deviasi yaitu 13,7056%.. Nilai rata-rata *sales growth* yang mengalami naik turun di setiap tahunnya ini dapat disebabkan oleh tingkat penjualan yang diperoleh perusahaan yang berubah-ubah setiap tahunnya.

## **3. Kepemilikan Manajerial**

Kepemilikan manajerial merupakan pihak manajemen perusahaan yang menjadi pemegang saham dalam perusahaan tersebut yang aktif ikut andil dalam pengambilan keputusan di perusahaan (Sonya Majid, 2016:4).

Banyaknya sampel yang digunakan penelitian ini adalah sebanyak 140 data dengan nilai minimum sebesar 00,0% yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan manufaktur yang tidak memiliki kepemilikan manajerial di tahun 2016-2020. Nilai maksimum dari variabel kepemilikan manajerial sebesar 14,3% berasal dari perusahaan Alkindo Naratama Tbk. (ALDO) pada tahun 2016, yang menunjukkan bahwa perusahaan Alkindo Naratama Tbk. (ALDO) memiliki kepemilikan manajerial yang tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang lain. Selanjutnya, berdasarkan nilai *mean* dari variabel kepemilikan manajerial menunjukkan nilai sebesar 3,449% yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai standar deviasi yaitu 4,3199%. Hal ini

menjelaskan bahwa tingkat variasi data cukup tinggi atau bervariasi dari setiap nilai yang dihasilkan, sehingga data bersifat heterogen.

#### 4. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pihak institusi yang terdiri dari pemerintah, perusahaan asing, bank, lembaga keuangan seperti asuransi, dan dana pensiun pada perusahaan (Wayan *et al.*, 2016:177). Semakin tinggi kepemilikan institusional di dalam perusahaan maka semakin tinggi nilai investasi yang diberikan kedalam perusahaan yang membuat sistem *monitoring* dalam perusahaan menjadi lebih tinggi. Sebaliknya, semakin rendah kepemilikan institusional dalam perusahaan maka nilai investasi yang dimiliki perusahaan rendah yang menyebabkan *monitoring* dalam perusahaan juga rendah.

Banyaknya sampel yang digunakan penelitian ini adalah sebanyak 140 data dengan nilai minimum sebesar 31,2% yang dimiliki oleh perusahaan PT AKR Corporindo Tbk. (AKRA) pada tahun 2016. Hal tersebut menjelaskan bahwa perusahaan PT AKR Corporindo Tbk. (AKRA) memiliki investasi yang rendah dari pihak institusi dan menyebabkan sistem monitoring didalam perusahaan semakin rendah. Nilai maksimum dari kepemilikan institusional sebesar 99,7% berasal dari perusahaan Fajar Surya Wisesa Tbk. (FASW) pada tahun 2019, yang menunjukkan bahwa perusahaan Fajar Surya Wisesa Tbk. (FASW) memiliki nilai investasi yang tinggi yang membuat monitoring di dalam perusahaan semakin tinggi. Selanjutnya, berdasarkan nilai *mean* dari variabel kepemilikan institusional menunjukkan nilai sebesar 70,506% yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai standar deviasi yaitu 16,0604%.

#### Komisaris Independen

Komisaris independen di dalam perusahaan merupakan pengawas dalam tata kelola perusahaan, dimana hal ini berhubungan dengan kepentingan yang berbeda antara pihak manajemen dan pemegang saham yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan.

Banyaknya sampel yang digunakan penelitian ini adalah sebanyak 140 data dengan nilai minimum sebesar 20% yang dimiliki oleh perusahaan Kimia Farma Tbk. (KAEF) pada tahun 2016 dan 2017. Hal tersebut menjelaskan bahwa perusahaan memiliki komisaris independen yang lebih sedikit dibandingkan dengan perusahaan yang lain. Nilai maksimum dari komisaris independen sebesar 67% berasal dari perusahaan Kabelindo Murni Tbk. (KBLM) di tahun 2018, yang menunjukkan bahwa perusahaan Kabelindo Murni Tbk. (KBLM) memiliki komisaris independen yang cukup banyak untuk mengawasi tata kelola perusahaannya. Selanjutnya, berdasarkan nilai *mean* dari variabel komisaris independen menunjukkan nilai sebesar 39,92% yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai standar deviasi yaitu 8,701%. Hal ini menjelaskan bahwa tingkat variasi data cukup rendah atau kurang bervariasi dari setiap nilai yang dihasilkan, sehingga data bersifat homogen.

#### Uji Asumsi Klasik

##### Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji sebaran pada data atau variabel penelitian yang akan diuji normal atau tidak. Uji normalitas pada data penelitian ini menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov. Apabila hasil Asymp. Sig. (2-tailed)  $\geq 0,05$ , maka,  $H_0$  diterima, yaitu data dikatakan berdistribusi normal. Hasil pengujian normalitas disajikan pada tabel 4.7 sebagai berikut:

**Tabel 4.9**  
**Hasil Uji Kolmogrov-Smirnov**  
**(setelah outlier)**

N	140
Asymp. Sig. (2-tailed)	.200 <sup>c,d</sup>

Sumber: Hasil Output SPSS

Berdasarkan tabel 4.9 hasil dari uji normalitas setelah di *outlier* menunjukkan jumlah data yang dihasilkan sebanyak 140 data dengan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200, yang mana angka tersebut lebih besar dari 0,05. Hasil tersebut menyatakan  $H_0$  diterima dengan data berdistribusi normal.

**Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk

menguji apakah variabel memiliki ketidaksamaan varian dari residual dalam penelitian pada model regresi. Dengan model regresi yang baik yaitu tidak terjadi heteroskedastisitas. Pada penelitian ini menggunakan Uji *Glejser*. Hasil pengujian heteroskedastisitas disajikan pada tabel 4.10 sebagai berikut

**Tabel 4.10**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Model		Sig.
1	(Constant)	.000
	Sales Growth	.418
	Kepemilikan Manajerial	.008
	Kepemilikan Institusional	.862
	Komisaris Independen	.010

Sumber: Hasil Output SPSS

Tabel 4.10 menunjukkan nilai Sig. pada masing-masing variabel independen hasil regresi antara absolut residual dengan variabel independen penelitian. Variabel kepemilikan manajerial dan komisaris independen menunjukkan nilai 0,008 dan 0,010, dimana nilai tersebut kurang dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan variabel kepemilikan manajerial dan komisaris independen terjadi masalah heteroskedastisitas, yang disebabkan karena varian residual variabel kepemilikan manajerial dan komisaris independen tetap. Sedangkan variabel independen yang lain yaitu *sales growth* dan kepemilikan institusional memiliki nilai lebih dari 0,05, dimana kedua variabel independen tersebut terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Dalam

penelitian ini sudah dilakukan empat kali *outlier* untuk menghapus data yang terlalu ekstrim, namun data untuk variabel kepemilikan manajerial dan komisaris independen masih mengalami heteroskedastisitas.

**Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah model regresi memiliki korelasi antar variabel independen nya. Model regresi yang baik menunjukkan tidak adanya korelasi di antara variabel independen. Dalam penelitian ini untuk melihat ada atau tidaknya multikolinearitas pada model regresi dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan nilai VIF (*variance inflation factor*). Hasil pengujian multikolinearitas disajikan pada tabel 4.11 sebagai berikut:

**Tabel 4.11**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Constant		
	<i>Sales Growth</i>	.989	1.011
	Kepemilikan Manajerial	.996	1.004
	Kepemilikan Institusional	.967	1.034
	Komisaris Independen	.960	1.042

Sumber: Hasil Output SPSS

Berdasarkan tabel 4.11 hasil dari uji

multikolinearitas menunjukkan tidak ada

variabel independen yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,10 dan nilai VIF lebih dari 10. Hasil tersebut dapat diartikan model regresi terbebas dari gejala multikolinieritas.

### Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk

menguji ada tidaknya korelasi antara periode t dengan periode sebelumnya (t - 1) pada model regresi, dimana terdapat *problem* autokorelasi jika ditemukan korelasi. Berikut hasil pengujian autokorelasi ditunjukkan pada tabel 4.12:

**Tabel 4.12**  
**Hasil Uji Autokorelasi**

Model	R	R Square	Adjusted Square	R	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.303	.092	.065		.075836	2.000

Sumber: Hasil Output SPSS

Berdasarkan tabel 4.12 maka diperoleh hasil Durbin-Watson (d) sebesar 2,000 dengan  $\alpha =$

0,05 dan k=4. Informasi lainnya yang diperoleh adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.13**  
**Uji Autokorelasi Durbin Watson**

D-W	K	N	dU	4-dU	dL	4-dL	Keterangan
2,000	4	140	1,7830	2,2170	1,6656	2,3344	Bebas dari autokorelasi

Sumber: data diolah, 2021

Hasil output spss dari uji autokorelasi Durbin Watson di tabel 4.13 menunjukkan hasil  $dU < d < 4-dU = 1,7830 < 2,000 < 2,2170$  dimana menunjukkan model regresi tidak terjadi autokorelasi.

untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, dimana variabel independennya lebih dari satu. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda maka didapatkan hasil yang dijelaskan dalam tabel 4.14 sebagai berikut:

### Uji Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan

**Tabel 4.14**  
**Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**

Model		Unstandarized Coefficients		Sig.
		B	Std. eror	
1	Constant	.197	.038	.000
	Sales Growth	.029	.047	.539
	Kepemilikan Manajerial	-.452	.149	.003
	Kepemilikan Institusional	-.032	.041	.433
	Komisaris Independen	.002	.001	.036

Sumber: Hasil Output SPSS

Pada tabel 4.14 menjelaskan persamaan dalam model regresi penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$CETR = 0,197 - 0,452 KM + 0,002 KI + e$$

Keterangan:

Y = *Tax Avoidance*

$\alpha$  = Konstanta

$\beta_{1,2,3,4}$  = Koefisien regresi

KM = Kepemilikan Manajerial

KI = Komisaris Independen

e = Error

Berdasarkan persamaan regresi linier berganda tersebut, dapat dijelaskan bahwa:

- Konstanta ( $\alpha$ ) sebesar 0,197 menjelaskan bahwa jika variabel independen penelitian yaitu *sales growth*, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan komisaris independen dianggap konstan

maka nilai *tax avoidance* adalah sebesar 0,197.

- b. Koefisien regresi kepemilikan manajerial sebesar - 0,452 dapat diartikan bahwa setiap variabel kepemilikan manajerial meningkat sebesar satu satuan maka akan mengalami penurunan nilai *tax avoidance* sebesar 0,452 dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan. Variabel yang memiliki koefisien regresi negatif menjelaskan adanya hubungan negatif terhadap variabel dependen.
- c. Koefisien regresi komisaris independen sebesar 0,002 dapat diartikan bahwa setiap variabel komisaris independen meningkat sebesar satu satuan maka akan

meningkatkan nilai *tax avoidance* sebesar 0,002 dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan. Variabel yang memiliki koefisien regresi positif menjelaskan adanya hubungan positif terhadap variabel dependen.

**Pengujian Hipotesis**

**Uji F**

Uji F digunakan untuk mengidentifikasi model mana yang paling sesuai dengan populasi dari penelitian dimana data dijadikan sampel dan untuk mengetahui apakah semua variabel independen di dalam model regresi berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil uji F penelitian ini disajikan pada tabel 4.15 sebagai berikut:

**Tabel 4.15**  
**Hasil Pengujian Uji F**

Model	F	Sig.
1.	3.408	.011

Sumber: Hasil Output SPSS

Berdasarkan tabel 4.16 menjelaskan bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,092 atau 9,2% yang berarti bahwa *sales growth*, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan komisaris independen mampu mempengaruhi *tax avoidance* sebesar 9,2% sedangkan sisanya sebesar 90,8% dijelaskan

oleh variabel lain yang tidak ada di dalam model regresi penelitian ini.

**Uji t**

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji t penelitian ini disajikan pada tabel 4.17 sebagai berikut:

**Tabel 4.17**  
**Hasil Pengujian Uji t**

Model	t	Sig.	
1	Constant	5.134	.000
	Sales Growth	.616	.539
	Kepemilikan Manajerial	-3.030	.003
	Kepemilikan Institusional	-.786	.433
	Komisaris Independen	2.117	.036

Sumber: Hasil Output SPSS

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.17 menunjukkan nilai t-hitung masing-masing variabel independen, yaitu *sales growth*, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan komisaris independen.

**Pembahasan**

1. Pengaruh *Sales Growth* Terhadap *Tax Avoidance*

*Sales growth* menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan

penjualan dari tahun ke tahun yang dapat digunakan sebagai acuan untuk pertumbuhan di masa depan (Rahmawati et al., 2018). Semakin tinggi *sales growth* yang dihasilkan perusahaan maka akan mempengaruhi beban pajak yang akan dibayar perusahaan juga semakin besar. Perusahaan dengan *sales growth* sering kali merasa keberatan dengan beban pajak yang dibayarkan, sehingga perusahaan cenderung melakukan *tax avoidance*.

Berdasarkan hasil pengujian uji t, nilai *t sales growth* adalah sebesar 0,539 dimana lebih besar dari 0,05 yang menjelaskan bahwa variabel *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* sehingga  $H_1$  ditolak. Hal ini membuktikan bahwa kenaikan dan penurunan *sales growth* tidak mempengaruhi *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Sales growth* kurang mampu dalam mempengaruhi tindakan *tax avoidance* didalam perusahaan karena adanya faktor variabel lain yang lebih mempengaruhi manajemen, seperti ukuran perusahaan dari perusahaan manufaktur.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan (Asri & Mahfudin, 2021) yang menunjukkan *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* dimana tinggi rendahnya *sales growth* di perusahaan tidak mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. *Sales growth* bukan menjadi alasan perusahaan manufaktur melakukan *tax avoidance*, hal ini karena dengan *sales growth* yang baik akan membuat total aset dalam perusahaan akan semakin besar. Keadaan tersebut akan membuat perusahaan kesulitan untuk melakukan perencanaan pajak dengan *tax avoidance*. Serta perusahaan dengan *sales growth* yang tinggi maupun rendah akan memiliki kewajiban yang sama dalam membayar pajak.

## 2. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap *Tax Avoidance*

Kepemilikan manajerial merupakan keadaan dimana manajemen perusahaan memiliki kepemilikan saham di perusahaan tersebut yang dapat diukur dengan jumlah persentase saham yang dimiliki perusahaan. Teori keagenan menjelaskan bahwa kepemilikan manajerial merupakan instrumen atau alat yang digunakan untuk mengurangi konflik antara pemegang saham dan perusahaan. Adanya kepemilikan manajerial di dalam perusahaan akan membantu dalam mengatasi *agency problem* karena keselarasan tujuan antara pihak manajemen dengan pemegang

saham.

Manajemen didalam perusahaan cenderung lebih memperhatikan pendapatan atau laba yang diperoleh agar tetap pada jumlah yang besar, sehingga manajemen akan lebih *agresive* untuk melakukan *tax avoidance*. Tujuan lain manajemen dalam memperkecil beban pajak perusahaan yaitu untuk menarik investor dan untuk mendapat bonus yang besar atas laba yang dihasilkan perusahaan. Saat perusahaan manufaktur memiliki struktur kepemilikan manajerial yang tinggi, kemungkinan besar perusahaan akan melakukan penghindaran pajak karena manajemen yang selalu berupaya untuk memperoleh laba setinggi-tingginya dengan beban pajak yang perlu dikeluarkan rendah. Semakin tinggi nilai persentase kepemilikan manajerial didalam perusahaan manufaktur maka semakin tinggi *tax avoidance* yang terjadi.

Berdasarkan hasil pengujian uji t, nilai *t* kepemilikan manajerial adalah sebesar 0,003 lebih kecil dari 0,05 yang menjelaskan bahwa variabel kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *tax avoidance* sehingga  $H_2$  diterima. Hal ini membuktikan bahwa kenaikan dan penurunan kepemilikan manajerial mempengaruhi *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kepemilikan manajemen didalam perusahaan tentu sangat memperhitungkan keputusan yang mereka ambil, seperti salah satunya dalam melakukan *tax avoidance* yang mereka anggap dapat menguntungkan perusahaan, sehingga kepemilikan manajerial ini berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ashari *et al.*, (2020), Putri & Lawita (2019), dan Wijayanti *et al.*, (2018) dimana mereka berpendapat jika kepemilikan manajerial berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Semakin tinggi tingkat kepemilikan manajerial dalam perusahaan maka semakin tinggi juga pengaruh pihak manajemen dalam melakukan *tax avoidance* di perusahaan, hal

ini karena keberadaan dari kepemilikan manajerial di dalam perusahaan akan berpengaruh dalam pengambilan keputusan manajer dalam melakukan *tax avoidance*. Pengambilan keputusan dalam pajak inilah yang membedakan kepemilikan manajerial dengan kepemilikan institusional, dimana manajemen akan lebih memperhatikan laba yang didapat oleh perusahaan agar perusahaan dapat menghasilkan laba sebesar mungkin. Pihak manajemen akan lebih dominan mencari celah yang menguntungkan perusahaan serta pemegang saham perusahaan, yaitu salah satunya dengan melakukan *tax avoidance* untuk mengurangi beban pajak yang perlu dikeluarkan perusahaan dan akan meningkatkan laba perusahaan. Kepemilikan manajerial di dalam perusahaan juga akan berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan perpajakan di perusahaan, karena hal tersebut akan berpengaruh langsung ke dirinya sendiri selaku pemegang saham perusahaan.

Hasil ini juga mendukung teori keagenan yang mana dengan adanya kepemilikan saham oleh manajer ini diharapkan dapat membantu mengurangi konflik kepentingan antara *stakeholder (principal)* dan manajer (agen) yang dijelaskan di teori *agency*, dan membantu dalam menyelaraskan kepentingan antara pemegang saham (*stakeholder*) dan manajer.

### 3. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh institusi seperti institusi keuangan, asuransi bank, pemerintah, dana pensiun dan lain-lain. Kepemilikan institusional berperan sebagai pengawas kinerja manajemen didalam perusahaan, mendisiplinkan, dan mempengaruhi manajemen agar menghindari perilaku untuk mementingkan kepentingannya sendiri. Kepemilikan institusional juga menjadi pihak yang memonitor perusahaan yang belum mampu dalam mengontrol tindakan manajemen dalam melakukan *tax avoidance*.

Berdasarkan hasil pengujian uji t, nilai t kepemilikan manajerial adalah sebesar 0,433

lebih besar dari 0,05 yang menyatakan bahwa variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* sehingga H<sub>3</sub> ditolak. Hal ini membuktikan bahwa kenaikan dan penurunan kepemilikan institusional tidak mempengaruhi *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Terdapat beberapa alasan yang diduga penyebab tidak berpengaruhnya kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance*. Pertama, kepemilikan institusional yang tidak melakukan pengawasan terhadap keputusan pajak yang diambil oleh manajemen. Kedua, pihak institusional yang hanya berfokus pada investasi yang mereka lakukan didalam perusahaan. Terakhir, pihak institusional yang kurang peduli pada citra perusahaan yang terpengaruh apabila perusahaan melakukan *tax avoidance*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putri (2018) dan Diantari & Ulupui (2016) yang menunjukkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hasil dari analisis data serta perhitungan secara statistik, kepemilikan institusional tidak mampu mengawasi tindakan manajemen dalam mengambil kebijakan-kebijakan perusahaan agar dapat mengurangi tindakan *tax avoidance* dalam perusahaan. Hal tersebut dikarenakan adanya indikasi pihak institusi yang tidak ikut berpartisipasi dalam pengawasan perusahaan yang dapat mempengaruhi manajemen, serta pihak institusi lebih fokus dengan kesejahteraan mereka sendiri dalam memaksimalkan keuntungan masa depan investasi mereka yaitu atas dividen yang akan diperoleh kedepannya.

### 4. Pengaruh Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance*

Komisaris independen merupakan anggota komisaris yang tidak memiliki hubungan bisnis atau hubungan lainnya dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali yang dapat berpengaruh terhadap kemampuannya dalam bertindak independen (*Task Force* Komite Nasional). Komisaris independen dalam

penelitian ini diukur dengan cara jumlah komisaris independen dibagi dengan jumlah anggota dewan komisaris. Menurut teori agensi ketika peran komisaris independen di perusahaan efektif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, maka kegiatan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan dapat diminimalisir, begitupun sebaliknya.

Berdasarkan hasil pengujian uji t, nilai t komisaris independen adalah sebesar 0,036 lebih kecil dari 0,05 yang menjelaskan bahwa variabel komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance* sehingga H<sub>4</sub> diterima. Hal ini membuktikan bahwa kenaikan dan penurunan komisaris independen mempengaruhi *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Komisaris independen didalam perusahaan manufaktur mampu melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik sebagai pihak netral serta pengawas terhadap tindakan yang dilakukan manajemen didalam perusahaan dalam mengambil keputusan untuk melakukan *tax avoidance*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Faradisty *et al.*, (2019), Wijayanti *et al.*, (2018) dan Diantari & Ulupui (2016) yang menunjukkan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Menurut Yadasang (2019) keberadaan dewan komisaris independen di dalam perusahaan diharapkan dapat menyeimbangkan kepentingan antara manajemen perusahaan dan para *stakeholder* di dalam perusahaan. Berdasarkan mekanisme *good corporate governance* komisaris independen bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap manajemen dalam pengambilan keputusan pajak pada perusahaan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini selaras dengan teori agensi yang merupakan adanya hubungan antara pemegang saham dengan manajemen perusahaan.

Hasil ini juga mendukung teori keagenan dimana komisaris independen sebagai pengawas dari jalannya manajemen perusahaan memiliki pengaruh terhadap *tax*

*avoidance* karena di dalam perusahaan, komisaris independen memiliki peran sebagai pihak netral antara *stakeholder* dan manajer. Sebagai penengah antara *stakeholder* dan manajer, komisaris independen akan mengontrol tindakan yang dilakukan oleh pemegang saham dan manajer. Sehingga dengan adanya dewan komisaris independen akan dapat membantu untuk meminimalkan dilakukannya *tax avoidance* di dalam perusahaan.

## **KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pengujian statistik yang telah dilakukan peneliti, maka diperoleh hasil pengujian hipotesis dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. *Sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang artinya tinggi atau rendahnya *sales growth* didalam perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang dilakukan didalam perusahaan. Hal ini karena terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* di perusahaan seperti ukuran perusahaan. Serta *sales growth* yang baik akan membuat total aset dalam perusahaan akan semakin besar. Keadaan tersebut akan membuat perusahaan kesulitan untuk melakukan perencanaan pajak dengan *tax avoidance*.
2. Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang artinya semakin tinggi kepemilikan manajerial di dalam perusahaan maka semakin tinggi pula *tax avoidance* yang dilakukan didalam perusahaan. Hal ini karena manajemen yang juga sebagai pemilik saham perusahaan ingin agar perusahaan mendapatkan laba yang besar dengan meminimalkan beban-beban yang ada, salah satunya yaitu beban pajak. Sehingga kepemilikan manajerial akan cenderung memilih untuk melakukan *tax avoidance*.
3. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang

artinya tinggi atau rendahnya kepemilikan institusional di dalam perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang dilakukan didalam perusahaan. Hal ini karena pihak institusi kurang dalam melakukan tugas pengawasan di dalam perusahaan dan kepemilikan institusi lebih fokus dalam kesejahteraan mereka sendiri dalam memaksimalkan keuntungan investasi mereka.

4. Komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang artinya tinggi atau rendahnya komisaris independen di dalam perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Hal ini karena fungsi pengawasan keputusan pajak dalam perusahaan di mekanisme *corporate governance* yang dilaksanakan dewan komisaris independen berjalan dengan baik di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia serta proporsi dari komisaris independen di masing-masing perusahaan manufaktur sudah mengikuti peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

#### **Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang dapat digunakan oleh peneliti selanjutnya sebagai bahan acuan menulis. Berikut keterbatasan dalam penelitian ini:

1. Banyaknya ketidaksesuaian data dengan kriteria sampel sehingga sampel penelitian banyak yang tereliminasi.
2. Variabel penelitian kepemilikan manajerial dan komisaris independen mengalami heteroskedastisitas yang berarti terjadi ketidaksamaan varian dari residual dalam penelitian pada model regresi.
3. Hasil nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* pada penelitian cukup rendah yaitu dibawah sepuluh persen sehingga kemampuan variabel independen penelitian dalam menjelaskan variabel dependennya terbatas.

#### **Saran**

Adanya keterbatasan pada penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan untuk

penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Saran bagi peneliti selanjutnya agar dapat mempertimbangkan kembali kriteria secara berturut-turut yang digunakan dalam pengambilan data agar memperoleh data sampel yang lebih banyak dan tetap memasukkan data selama data ditemukan di laporan keuangan.
2. Saran bagi peneliti selanjutnya agar lebih berhati-hati dalam menginput data dan mengolah data dari masing-masing variabel penelitian.
3. Dikarenakan nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* pada penelitian cukup rendah, maka untuk penelitian selanjutnya disarankan agar menambah variabel independen selain *sales growth*, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan komisaris independen yang memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* dengan merujuk jurnal-jurnal yang relevan, seperti mekanisme dalam *good corporate governance*, likuiditas atau yang lain sebagainya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agoes, S., & Ardana, I. C. (2014). *Etika Bisnis dan Profesi*. Salemba Empat.
- Ashari, M. A., Simorangkir, P., & Maspirah. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Jurnal Syntax Transformation*, 1(8), 488–498.
- Asri, A. A., & Mahfudin, E. (2021). *Pengaruh Intensitas Aset Tetap Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak*. 5(1), 90–97.
- Astuti, D. F., Dewi, R. R., & Fajri, R. N. (2020). Pengaruh Corporate Governance dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2014-2018. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 210.
- Astuti, T. P., & Aryani, Y. A. (2017). Tren Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur Di Indonesia Yang Terdaftar

- Di Bei Tahun 2001-2014. *Jurnal Akuntansi*, 20(3), 375–388.
- Dariuni, N. H., Zohdi, A. R., & Jamali, A. H. (2019). Corporate Governance and Relationship between Ownership Structure, Social Responsibility and Tax Avoidance. *Science Arena Publications International Journal of Business Management*, 4, 126–141.
- Dewi, N. M. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. *Maksimum: Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, 9(1), 40–51.
- Dewinta, I. A. R., & Setiawan, P. E. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14.3, 1584–1613.
- Diantari, P. R., & Ulupui, I. A. (2016). Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. 16.1, 702–732.
- Effendi, M. A. (2016). *The Power of Good Corporate Governance* (2nd ed.). Salemba Empat.
- Faradisty, A., Hariyani, E., & Wiguna, M. (2019). The effect of corporate social responsibility, profitability, independent commissioners, sales growth and capital intensity on tax avoidance. *Journal of Contemporary Accounting*, 1(3), 153–160.
- James, C. V. H., & John, M. W. J. (2014). *Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan (Fundamentals of Financial Management)* (13th ed.). Salemba Empat.
- Karimah, H. N., & Taufiq, E. (2016). Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan. *Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 4(1), 72–86.
- Kasmir. (2016). *Analisis Laporan Keuangan*. Raja Grafindo Persada.
- Krisna, A. M. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial pada Tax Avoidance dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi*, 18(2), 82–91.
- Lamora, S., Vince, & Kamaliah. (2016). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Keluarga Terhadap Manajemen Laba. *Journal of Accounting and Economics*, 1–15.
- Maharani, A., Titisari, K. H., & Laela, S. N. (2017). Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Sales Growth, dan CSR Terhadap Tax Avoidance. *Seminar Nasional IENACO*, 732–742.
- Mukhtar, M. (2021). The Effect of Transfer Pricing, Leverage, and Sales Growth on Tax Avoidance. *SSRN Electronic Journal*, 5(1), 90–97.
- Putri, A. A., & Lawita, N. F. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Akuntandu Dan Ekonomika*, 9.
- Rahmawati, S., Salim, M. A., & ABS, M. K. (2018). Pengaruh Likuidita, Pertumbuhan Penjualan, Modal Kerja, Ukuran Perusahaan dan Leverage terhadap Profitabilitas Perusahaan (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar pada BEI pada Tahun 2014-2016). *Jurnal Riset Manajemen*.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan-Keahlian* (6th ed.). Salemba Empat
- Suandy, E. (2017). *Perencanaan Pajak* (6th ed.). Salemba Empat.